

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR
NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG PENCALONAN
DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2008)



OLEH :

DEDE AHMAD
NIM. 10775000384

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011

Abstrak

ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2008)

Oleh
DEDE AHMAD
NIM. 10775000384

Pemerintahan desa juga merupakan pemerintah terendah yang berada dibawah pemerintahan kabupaten, sehingga mutlak untuk dilaksanakan otonomi desa secara kontinyu dan berkelanjutan untuk tercapainya rasa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan seorang Kepala Desa yang memimpin wilayah desa bersama perangkatnya. Pemilihan Kepala Desa sejauh ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan prasurvei penulis bahwa pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih belum maksimal. Selain masih sedikitnya jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa, pendidikan yang diikuti oleh calon Kepala Desa didominasi oleh tamatan SLTP dan SLTA.

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dalam penelitian ini yang populasi untuk panitia, perangkat desa dan BPD penarikan sampel dilakukan dengan metode teknik sensus, sedangkan sampel dari masyarakat diambil dengan teknik Accidental Random Sampling.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa diatas maka rata-rata tanggapan responden menyatakan tanggapan cukup baik, alasan cukup baik ini diberikan karena saat ini pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang berjalan cukup lancar dan dilakukan secara demokratis. Dalam melaksanakan dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa masih terdapat beberapa kendala atau hambatan antara lain : kurang pengkaalamannya pihak panitia, kurangnya dilakukan penyeleksian calon kepala desa dengan ketat dan kurangnya akuntabilitas dari aparatur.

Penulis menyarankan hendaknya pihak Panitia perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan pengalaman mengenai tata cara pemilihan kepala desa agar pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghadapi kendala yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Implementasi.....	11
2.2. Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	12
2.3. Konsep Kepemimpinan.....	16
2.4. Konsep Pemerintahan.....	20
2.5. Teori Otonomi dan Konsep Desa.....	23
2.6. Desa Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005 Tentang Desa	27
2.7. Hipotesis.....	33
2.8. Variabel Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3. Populasi dan Sampel	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	39
4.2 Tinjauan Sejarah Desa.....	39
4.3 Keadaan Geografis	40
4.4 Profil Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.....	41
4.5 Struktur Organisasi.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Identitas Responden.....	52
5.2 Analisis Implementasi Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak.....	55
5.3 Kendala atau Hambatan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.....	68
BAB VI PENUTUP.....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2008 – 2014 Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar.....	6
Tabel I.2 Nama Calon Kepala Desa Berdasarkan Periode	6
Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Desa Batu Sasak.....	36
Tabel IV.1 Distribusi Penduduk Menurut Usia	42
Tabel IV.2 Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	43
Tabel V.1 Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel V.2 Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Kelompok Umur	53
Tabel V.3 Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Persiapan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu	58
Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Penjaringan dan Seleksi Kepala Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu	60
Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu	63
Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan	

Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala desa Terpilih	
Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu	65

Tabel V.8

Rekapitulasi Analisis Implementasi Perda Kab. Kampar	
Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan	
Kepala Desa di Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Setiap organisasi selalu memiliki struktur organisasi yang menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu struktur organisasi sangat berguna untuk mengetahui besar kecilnya suatu organisasi, saluran perintah dan tanggung jawab, kedudukan masing-masing pejabat dan jumlah pejabat yang ada serta hubungan staf dan lainnya.

Menyadari pentingnya manusia dalam organisasi maka perlunya dilakukan pembagian kerja yang bertujuan untuk mengarahkan terjalannya kerja sama sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam

pembahasannya membahas tentang suatu organisasi yang terkecil yang ada ditingkat desa yaitu suatu organisasi yang dinamakan dengan pemerintahan desa, yang dilihat sebagai wadah publik yang akan mewujudkan suatu lingkungan berdemokrasi kepada warga masyarakat desa, secara nyata dan terarah (Wasistiono, 2002:4)

Dalam suatu negara, tentu tidak terlepas dari segala fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Negara. Demikian juga halnya organisasi atau institusi yang ada ditingkat desa, memerlukan suatu organisasi yang dapat menjalankan segala proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu masyarakat desa juga menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong penegakan demokrasi di tingkat desa. Pelaksanaan otonomi Desa merupakan proses perubahan yang menyangkut bermacam aspek kehidupan manusia yang direncanakan didalam kehidupan masyarakat yang bersifat menyeluruh dan dapat dikembangkan secara sadar oleh aparaturnya pemerintahan desa dan didukung oleh kekuatan partisipasi masyarakat desa.

Otonomi salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai sasaran yang ingin dicapai. Hal ini tertuang didalam UUD 1945 dan juga tertuang didalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui pelaksanaan otonomi kepada daerah terutama pada pemerintahan desa.

Desa merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang merupakan bentuk kongkrit dari wilayah Republik Indonesia, dimana sebagian besar tempat bermukimnya rakyat Indonesia. Pemerintah desa juga merupakan pemerintah terendah yang berada dibawah pemerintah kabupaten, sehingga mutlak untuk dilaksanakan otonomi desa secara kontinyu untuk tercapainya rasa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari 4 sub sistem yang menyusun desa yakni kepemimpinan, kelembagaan pemerintahan desa, sumber daya sosial serta lingkungan dan infrastuktur (Wasistiono, 2002 : 16).

Pembangunan disetiap wilayah pedesaan merupakan perpaduan kegiatan pembangunan sektoral dan regional dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu perlu diusahakan peningkatan dan pemantapan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang berlangsung di setiap wilayah.

Upaya pencapaian tujuan organisasi tidak dapat dipisahkan dari fungsi pimpinan organisasi. Pimpinan memiliki peranan yang sangat penting dimana sebagai seorang pimpinan harus mampu mengatur, mengkoordinasi serta mampu menggerakkan para bawahannya agar mereka berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi.

Adapun peran pimpinan di sini mencakup beberapa hal yaitu :

1. Peran pemimpin dalam membuat keputusan

2. Peran pemimpin dalam menciptakan hubungan antar pribadi
3. Peran pemimpin yang berhubungan dengan informasi.

Dari peranan pimpinan di atas, diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batu Sasak dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan seorang kepala desa yang memimpin wilayah desa bersama dengan perangkatnya. Pemimpin merupakan hasil pilihan dari masyarakat dan tentunya pilihan tersebut berdasarkan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dengan melakukan pemungutan suara, suara yang terbanyak merupakan pimpinan atas pilihan masyarakat.

Karena pentingnya pemimpin, maka Desa Batu Sasak melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Sasak sejauh ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 merupakan Perda yang berisikan tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pemungutan kepala desa, sehingga tata cara pemilihan kepala desa dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada didalam peraturan daerah tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang pencalonan, pemilihan dan pemungutan kepala desa Pasal 7 juga dijelaskan tentang persyaratan calon kepala desa yaitu penduduk desa warga negara Indonesia yang berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat.

Berdasarkan prasurvey Penulis, bahwa pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih belum maksimal. Selain masih sedikitnya jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa, juga pendidikan para calon Kepala Desa didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dalam pandangan Penulis, pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu sejauh ini belum mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut dalam pemilihan, baru 1/3 masyarakat di Desa Batu Sasak yang ikut dalam pemilihan. Selain itu pemilihan Kepala Desa didominasi tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dengan rendahnya tingkat pendidikan calon Kepala Desa tersebut dirasakan Penulis masih kurang memiliki wawasan dan pengetahuannya untuk memimpin sebuah desa yang memiliki masyarakat yang heterogen dan permasalahan desa yang sangat kompleks yakni masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di bawah ini diperlihatkan panitia pemilihan Kepala Desa periode 2008-2014 Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel I.1. Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2008 – 2014 Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar

No	Nama	Pendidikan
1.	SUMANTRI	SLTP
2.	M.SALEH	SD
3.	MARDI	SLTA
4.	TAMRIN	SD
5.	YOYON RISMAN	SLTA
6.	ANTO	SD
7.	TARMIZI	SLTA
8.	M.YUSUF	SLTA
9.	BASTIAN	SD
10.	SURIL	SD

Sumber : Desa Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 2010

Untuk melihat perkembangan pemilihan Kepala Desa dalam 2 periode terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2. Nama Calon Kepala Desa Berdasarkan Periode

No	Periode	Nama Calon	Pendidikan
1	2003 - 2008	M.Sidik (Terpilih) Masrul Iskandar Amril	SD SLTP SD
2	2008 – 2014	Masrul Iskandar (Terpilih) Rusman Joni Kurniawan	SLTP SD SLTA

Sumber : Desa Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat calon Kepala Desa yang masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 tahun 2007 tentang pencalonan, pemilihan dan pemungutan Kepala Desa pasal 7 dijelaskan bahwa pihak yang mencalonkan diri

menjadi Kepala Desa berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan bahkan pada periode 2003 – 2008 calon Kepala Desa yang berpendidikan SD yang terpilih menjadi Kepala Desa dan pada periode 2008 – 2014 masih ada calon kepala desa yang berpendidikan SD.

Seorang pemimpin desa hendaknya mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri, untuk itu Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sangat membutuhkan aturan-aturan yang diterbitkan oleh BPD bersama Kepala Desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Peraturan yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan asli Desa belum maksimal dilakukan.

Dari kondisi yang ada di lapangan Penulis melihat beberapa gejala atau fenomena yang ada antara lain :

1. Dalam melakukan persiapan calon Kepala Desa masih banyak yang belum memenuhi ketentuan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 yang ada, dimana pada Pasal 7 dikatakan bahwa pendidikan calon Kepala Desa paling rendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) namun masih ada calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD).
2. Dalam melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa masih kurang maksimal/berpengalaman karena panitia bukan panitia periode yang lama sehingga kurang berpengalaman dalam menetapkan penjaringan bakal calon kepala desa

3. Dalam pemungutan suara, seharusnya 3 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, panitia pemilihan memberitahukan secara terbuka daftar pemilih, namun hal itu dilakukan 1 hari sebelum pemungutan suara

Berangkat dari fenomena pemilihan Kepala Desa di atas maka Penulis menetapkan judul : ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA BATU SASAK KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu ?
2. Mengapa Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Tidak Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2007 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Mengetahui kendala pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan pemilihan kepala desa di desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang profesional.
- b. Penelitian ini sebagai bahan acuan dan informasi pendukung bagi kalangan akademis yang berkeinginan untuk melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Isi dari bab ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Isi bab ini adalah gambaran umum tentang objek yang diteliti dan tempat dimana dilakukan penelitian seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini adalah membahas hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Perda Kabupaten Kampar NO.4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu)

VI. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik ke depannya

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Mazmanian (Dalam Nugroho, 2008 : 447) mengatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005 : 7).

Menurut “Mazmanian dan Paul A” Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2002 ; 51)

Lebih rinci lagi, “Mazmanian dan paul A” mengemukakan bahwa :

”Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan-keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya, proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali

dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (Wahab, 2002 ; 54)

2.2. Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari dua bagian, yaitu :

Bagian Pertama Tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa

Pasal 7 berisi tentang :

1. Calon kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta pemerintah
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat
 - d. Berumur paling rendah 25 tahun dan setinggi-tingginya 59 tahun pada saat pendaftaran
 - e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
 - f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat

- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 tahun beturut-turut tanpa terputus
- j. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD
- k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 17 Ayat 2 :

3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Panitia pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilih kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pertama : Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- 1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Kedua : Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- 1) Pimpinan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara.
- 2) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Panitia Pemilihan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 4

- 1) Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
- 2) Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
- 3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberhentian keanggotaan Panitia Pemilihan.
- 4) Keanggotaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD 5

Ketiga : Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
- b. Mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan;
- c. Menerima pendaftaran bakal calon;
- d. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- e. Membuat berita acara penetapan calon yang berhak dipilih;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih;
- g. Menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih;
- h. Menetapkan jadwal kampanye;
- i. Menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- l. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan perhitungan suara;
- m. Mensosialisasikan foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- n. Melaksanakan pemungutan;
- o. Menetapkan saksi yang diajukan oleh calon yang berhak dipilih

- p. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara serta mengirimkan Berita Acara dimaksud lengkap dengan persyaratan administrasi dan calon yang terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

- a. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD
- b. Menetapkan pencabutan status calon yang dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
- c. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan tata tertib pemilihan
- d. Menetapkan calon terpilih 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

- a. Menyampaikan laporan tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap 30 (tiga puluh) hari sekali; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemilihan Kepala Desa.

(Sekda Kabupaten Kampar, 2007)

2.3. Konsep Kepemimpinan

Tingkat kepuasan dan pengabdian seseorang kepada organisasi dalam hubungan dengan kedua pola kepentingan di atas pada dasarnya tergantung kepada sejauh mana kepentingan individu seseorang bersesuaian dengan kepentingan organisasi. Maka disini pulalah letak fungsi pimpinan organisasi,

yaitu untuk membina agar kepentingan individual masing-masing pekerja sejauh mungkin organisasi.

Pimpinan merupakan orang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat lebih dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, membimbing, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.

Sedangkan pengertian kepemimpinan menurut Komaruddin adalah merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang, agar orang itu berusaha mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Di dalam teori kepemimpinan terdapat teori jalan/alur kecil tujuan (Path-Goal-Theory) Anoraga dan Suyati (1995 : 85) mengemukakan adanya analisis dampak kepemimpinan (terutama pemimpin) terhadap motivasi bawahan, kepuasan dan pelaksanaan kerja.

Setiap pemimpin suatu organisasi memiliki tugas-tugas sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Menurut Komaruddin (1985:33) tugas seorang pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Membuat keputusan

Keputusan dalam arti umum adalah reaksi atas stimulasi. Reaksi seorang pemimpin adalah mutu pemimpin tersebut. Karena itu reaksi mungkin hanya berdasarkan gerak hati atau hasil pikiran yang ditimbang-timbang. Keputusan merupakan hasil pemilihan kemungkinan-kemungkinan, keputusan berhubungan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap keputusan manajemen hendaknya merupakan hasil pertimbangan yang tepat.

2. Menetapkan sasaran

Sasaran dapat berubah sepanjang masa, akan tetapi sasaran itu ditetapkan oleh seorang pemimpin.

3. Memilih dan mengembangkan petugas

Apabila keputusan dan sasaran telah dirumuskan dengan pasti maka memilih orang untuk mencapai sasaran merupakan satu hal yang penting.

4. Mengadakan komunikasi

Tugas pemimpin adalah menyebarkan perintah dan menerima laporan.

5. Memberikan motivasi

Tugas lain seorang pemimpin adalah memberikan dorongan dan ilham kepada bawahan. Dalam hal ini termasuk tugas membimbing dan mengarahkan sasaran. Tugas ini untuk sebagian besar orang merupakan tugas kejiwaan.

6. Mengawasi pelaksanaan

Memimpin berarti pula mengarahkan setiap elemen manajemen sehingga kelainan yang tidak normal dapat dihindarkan. Kegiatan ini sama artinya dengan menuntun bawahan dan seluruh elemen manajemen lainnya agar selalu bergerak dengan berpedoman kepada standar.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa salah satu tugas pemimpin adalah memberikan motivasi kepada bawahan agar bawahan termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat dan bersemangat sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, selain itu juga pemimpin harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan supaya mereka semangat bekerja dan sebagai supervise untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang telah

dilakukan bawahan, sehingga pemimpin bisa mengevaluasi kinerjanya sebagai pemimpin.

Peningkatan hasil kerja karyawan harus diperhatikan setiap atasan, ini menggambarkan bahwa sebuah organisasi senantiasa ingin memperhatikan bawahannya untuk maju.

Dari setiap tingkat, Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa diperlukan pemimpin yang dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat dari berbagai aspek seperti kebenaran ucapan, tingkah laku, kemampuan, serta seni memimpin yang baik.

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintahan atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa, di desa harus dapat menjalankan tugas, kewajiban dan mengatur staf-staf yang dipimpinnya.

Selain diberikan hak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, di desa juga mempunyai kewajiban menjalankan kebijakan pemerintah atasannya yang dikenal dengan tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam Pasal 207, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, kepala desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Setiap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pemerintahan atasannya selalu berimbang, maksudnya pemerintah atasannya bukan hanya sebagai pembuat keputusan dan kebijakan tetapi juga memberikan solusi dan yang tepat untuk dilaksanakan di daerah yang terendah, dalam hal desa ini.

2.4. Konsep Pemerintahan

Sebelum sampai pada pembicaraan tentang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan desa maka terlebih dahulu disinggung konsepsi ilmu pemerintahan, yakni menurut L.P Van de Spiegel (Ndraha, 2005 : 13) “Ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa yang menghendaki adanya perubahan yang lebih aspiratif dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka pemerintahan, termasuk pemerintahan desa untuk mau tidak mau harus bergeser ke paradigma baru (Ndraha, 2005 : 150) Menyatakan :

“Pemerintahan dulu sekedar menunjukkan struktur kekuasaan, hanya menunjukkan unsur kepala, staf dan unsur pelaksana pemerintahan (pelayanan dan pemberdayaan). Organisasi pemerintahan berparadigma baru harus bisa menunjukkan semua pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan, Khususnya pihak pemerintah dengan yang diperintah, pihak melayani dan dilayani, hal tersebut lebih penting dalam membuat standar pelayanan.”

Sesuai dengan konsep yang ditawarkan beliau dalam pemerintahan baru ada 9 (Sembilan) sasaran pengembangan pemikiran yang dirumuskan (Ndraha, 2005 : 30) :

1. Yang diperintah sebagai suatu fakta social
2. Kebutuhan tuntutan yang diperintah : jasa public dan layanan sipil
3. Pemerintah sebagai proses perubahan

4. Pemerintahan sebagai lembaga societal
5. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah adalah hubungan pemerintahan
6. Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
7. Bagaimana membangun pemerintah yang dipandang mampu menggunakan wewenang, kewajiban dan memikul tanggung jawab
8. Bagaimana menjalankan pemerintahan

Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dituntut untuk bertindak professional menurut fungsi pemerintahan. Menurut Rasyid (2001 : 14) fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pembangunan yang dijalankan oleh MPR, presiden dan DPR. MPR membuat dan merubah undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, presiden bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara presiden sendiri dapat membuat peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui harus dicabut.
2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ada dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga melibatkan MPR, terutama sekali melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.

3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh eksekutif atau presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

Menurut Sedarmayanti (2004 : 35), Pemerintah atau Government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kansil (2003 : 189), Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- Prinsip koordinasi
- Tertulis
- Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

2.5. Teori Otonomi dan Konsep Desa

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam Analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan atas dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelantikan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri.

Kepala desa sebagai pemimpin daerah yang terendah merupakan pelaksanaan pemerintahan yang membantu proses penyelenggaraan pemerintahan negara ini, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Saparin (2000 : 48) Kepala desa adalah pelaksana pemerintahan umum sebagai tugas pokok yang telah dilimpahkan dari pusat berdasarkan ketentuan-ketentuan administratif yang bersifat umum kepada pemerintahan yang berwenang, pemerintahan desa juga diberikan wewenang oleh kepolisian. Bersama dengan aparat pamong desa, kepala desa adalah administrasi pemerintah desa yang berada dalam wilayah.

Menurut Widjaja (2004 : 22) kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Kepala Desa :

1. Kedudukan Kepala Desa :
 - a. Alat Pemerintah
 - b. Alat Pemerintah Daerah
 - c. Alat Pemerintah Desa
2. Tugas Kepala Desa :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangga desa
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat desa.
 - c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.
3. Fungsi Kepala Desa :
 - a. Kegiatan rumah tangganya sendiri
 - b. Menggerakan partisipasi masyarakat
 - c. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya
 - d. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah
- 4. Kepala Desa bertanggung jawab kepada :
 - a. Bertanggung jawab kepada bupati
 - b. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD.

Menurut (Ndraha 1991 : 7) Desa merupakan subjek hukum, artinya tindakan-tindakan hukum dilakukan untuk :

- a. Mengambil keputusan dan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak-pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintahan desa.
- c. Memilih kepala desanya.
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
- e. Memiliki tanah sendiri.
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
- g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa.
- h. Menyelenggarakan gotong royong.
- i. Menyelenggarakan peradilan desa
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Suryaningrat (1989 : 116) mengenai urusan yang penting sedapat mungkin kepala desa harus bermusyawarah dengan pamong desa lainnya. Kepala desa berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan dengan peraturan-peraturan daerah, memimpin rapat desa dalam mengambil tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh

persetujuan rapat desa. Misalnya : meminjam uang, melepaskan hak atas tanah desa kepada negara dan sebagainya.

Selanjutnya Suryaningrat (1989 : 162) Kepala Desa juga harus mengadakan perubahan desa untuk memperoleh penghasilan desa misalnya pasar, pariwisata, dan lainnya. Kemudian segala kewenangan yang telah ada menurut hukum atau adat tetap menjadi kewenangan.

Di bidang pemerintahan Kepala Desa adalah :

1. Administratur pemerintahan.
2. Administratur pembangunan.
3. Administratur kemasyarakatan.
4. Memegang pimpinan kebijakan politik desa.
5. Menyelenggarakan koordinasi atas dinas atau jawatan yang ada didesa.

Sebagaimana yang dikemukakan bahwa salah satu unsur Pemerintahan Desa dalam pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa kepala desa tidak akan mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, tanpa adanya tugas pembantuan dari staf-staf desa. Hal ini dijelaskan didalam pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa

2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Sekretaris Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 203, Ayat 1 bagian Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dipilih langsung oleh masyarakat yang dipertegas tentang pemilihannya dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 maka tata cara pemilihan Kepala desa mencakup :

- A. Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa
- B. Penjaringan dan seleksi
- C. Pemungutan dan penghitungan suara
- D. Penetapan dan penegasan calon terpilih.

2.6. Desa Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat

diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa, Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah (Perda) dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala Desa (Kades) pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dipimpinnya dengan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati di Kabupaten yang bersangkutan atau Wali Kota di Kotamadya melalui Camat, kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya. Namun tetap memberikan laporan kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekdes yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPD, berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan diamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam rangka

pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, pemangku adat dan Tokoh Masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Yaitu usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pemerintah, potensi ekonomi dan kondisi social masyarakat yaitu jenis dan jumlah usaha desa dan produksi keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris, kerja sama industry dan meningkatkan volume pelayanan Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari PNS. Yaitu dalam ketentuan ini adalah PNS yang tersedia di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Subak, Sasi, Mapalus, Kajaroan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam

peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan masyarakat Desa antara lain, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa. Sebagai mitra pemerintah Desa salah satu tugas BPD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, anggota BPD mencari dan mengumpulkan informasi yang didapat langsung dari masyarakat. Hasil informasi tersebut berupa yang terkait tentang ketentuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus selalu proaktif dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa berdasarkan demokratisasi ekonomi.

Dalam prakteknya, BPD juga mempunyai program kerja pemerintahan Desa, program kerja tersebut antara lain :

- a. Perincian kebijakan Pemerintah Desa
- b. Memberikan saran atau pertimbangan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Desa yang lebih komprehensif diperlukan adanya peraturan daerah (Perda) sebagai mana dijelaskan pasal 216 Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut :

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah
- b. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Karakter peraturan daerah (Perda) yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa harus mampu menampung aspirasi atau kehendak dari masyarakat. Peraturan daerah (Perda) yang demikian tentu lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa.

Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga Negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik, jika dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bisa berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (representative government), yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah “musyawarah

untuk mufakat”. Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses (demokrasi substansial). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan atau aspek formalitas demokrasi ketimbang proses pencapaian aspek substansi demokrasi (Syahbudin, 2005 : 34).

Badan permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Desa. (peraturan pemerintah no 73 tahun 2005 pasal 1 ayat 8).

Badan permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan Desa. Keanggotaan BPD terdiri wakil penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (penjelasan PP No.72 Tahun 2005 : 54).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi BPD dalam rangka demokratisasi Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelastarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Lurah Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Pengertian wujud demokrasi Desa salah satunya adalah melalui pembentukan BPD semakin nyata dengan adanya pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Pemerintah ini telah menempatkan BPD sebagai unsure demokratisasi di dalam pemerintahan Desa.

2.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka Penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :
“Diduga Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Belum Berjalan Secara Baik.

2.8. Variabel Penelitian

Indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Persiapan Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa adalah melakukan pencalonan Kepala Desa yang berkualitas
2. Penjaringan dan seleksi bakal calon Kepala Desa adalah melakukan penjaringan atau penyeleksian Kepala Desa sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan
3. Pemungutan dan penghitungan suara adalah melakukan perhitungan suara yang diberikan masyarakat atas Kepala Desa yang terpilih
4. Penetapan dan pengesahan calon terpilih adalah menetapkan dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
5. Pelantikan Kepala Desa terpilih

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian dilakukan secara survey. Penelitian survey menurut Singarimbun (1995 : 3) adalah penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey secara kompleks adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner alat pengukuran data yang pokok.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang berlangsung selama tiga bulan yaitu dari tanggal 03 Maret 2011 sampai 03 Juni 2011.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 : 90)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Adapun untuk menentukan jumlah sampel yang refresentatif Penulis menggunakan teknik penarikan sampel dari teori Slevin yaitu :

$$n = \frac{N}{Ne^2} \quad \text{dimana :} \quad n = \text{sampel}$$

N = Populasi

e = tingkat kesalahan penarikan sampel (5-10%)

(Sugiyono, 2005 : 91)

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan seluruh aparat Desa serta pemuka masyarakat Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Jumlah populasi masyarakat yang memilih dalam penelitian ini adalah 500 orang, maka jumlah sampel penelitiannya adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + 500\left(\frac{10}{100}\right)^2} \quad n = \frac{500}{1 + 500(0,01)} \quad n = \frac{500}{1 + 5} \quad n = 83,3 \approx 83 \text{ orang}$$

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian Desa Batu Sasak

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Panitia Pemilihan	10	10	100 %
2	Perangkat Desa	5	5	100 %
3	BPD	11	11	100 %
4	Masyarakat yang memilih	500	83	17 %
	Jumlah	526	109	21 %

Sumber : pra survey pada Kantor Desa Batu Sasak, 2010

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penyebaran Quisioner yang disebarkan kepada responden di lapangan tempat melakukan penelitian yang meliputi :

- a. Pencalonan dan pemilihan kepala desa
- b. Penjaringan dan seleksi kepala desa
- c. Pemungutan dan penghitungan suara
- d. Penetapan dan pengesahan calon terpilih

2. Data Sekunder

Adalah data yang sudah ada yang diperoleh dari kantor Kepala Desa yang meliputi :

- Data keadaan geografis
- Data jumlah penduduk
- Data mata pencaharian penduduk
- Data sekunder lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian, pada pemerintahan Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui secara umum tentang implementasi Perda Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

b. Kuisioner

Adalah dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai pemilihan kepala desa dalam bentuk kuisioner

c. Wawancara

Adalah dengan mengadakan tanya jawab kepada, sampel yang diajukan sebagai responden untuk memperoleh data penelitian ini dalam bentuk wawancara tersusun.

3.6. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dikualifikasikan menurut jenis, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kedalam sebuah tabel induk untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak dan sub indikator dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel sehingga dapat mengetahui gambaran tentang pemilihan kepala desa yang dilakukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pemerintahan Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/TE/49 tanggal 9 November 1949, merupakan Kabupaten yang wilayahnya terluas di Propinsi Riau dengan memiliki 4 kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan Ibu Kota Kabupaten berkedudukan di Pekanbaru. Namun berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1956 kedudukan ibukota Kabupaten tersebut dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana pada tanggal 6 juni 1967.

Sejalan dengan perkembangan iklim politik di dalam negeri maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kampar sendiri (Induk), Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan dan sekarang ini ditambah dengan Rokan Hilir.

4.2. Tinjauan Sejarah Desa

Desa Batu Sasak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Desa Batu Sasak juga merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Ludai. Desa Batu Sasak dimekarkan dari desa Ludai pada tahun 1999 oleh Bupati Kampar pada waktu itu yaitu H. Beng Sabli. Semenjak dimekarkan hingga sekarang Desa Batu Sasak

mulai berbenah diri dalam berbagai bidang pembangunan terutama sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat.

4.3. Keadaan Gografis

Kabupaten Kampar terletak pada posisi antara 1020 Lintang Utara 101 40 Bujur Timur dengan batas wilayah adalah :

- a. Sebelah Utara dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuatan Singingi
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.707,64 km² atau ±12,38 persen dan luas Propinsi Riau dengan kondisi topografinya merupakan daerah daratan rendah, rawa-rawa, daratan tinggi/perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata 2 – 1.000 meter diatas permukaan laut. Hal tersebut mengakibatkan kondisi tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari lima jenis yaitu tanah orgasol dan Giel Humus dengan bahan induk Alluvial, jenis tanah podsolik merah kuning, latosol, litisol dengan lahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya adalah liat berpasir dan lempung berpasir.

Dari aspek hidrologi, Kabupaten Kampar memiliki 2 aliran sungai yang besar yakni Sungai Kampar yang panjangnya sekitar ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan Sungai Siak yang merupakan hulu yang memiliki panjang sekitar ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 meter. Keberadaan sungai ini sangat menguntungkan bagi warga masyarakat yang ada di

kabupaten Kampar umumnya dan bagi warga masyarakat Desa Batu Sasak khususnya, karena keberadaan sungai ini sebagai salah satu pusat hidrologi akan menyeimbangkan ekosistem lingkungan daerah tersebut. Keberadaan sungai ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi sector perekonomian masyarakat daerah tersebut. Masyarakat dapat memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan seperti, perikanan, pertanian dan bahkan industri. Hal ini merupakan factor yang menguntungkan bagi warga masyarakat yang dapat memanfaatkannya dengan maksimal dan tepat guna.

4.4. Profil Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Desa Batu Sasak terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Kampar Kiri hulu dengan luas wilayah 1.000 Ha. Adapun jarak dari desa Batu Sasak dengan ibukota kecamatan adalah 50 km, sedangkan jarak dari desa Batu Sasak ke ibukota kabupaten adalah 120 km, dan jarak dari desa Batu Sasak ke ibukota provinsi adalah 125 km.

Luas desa Batu Sasak 1.000 Ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah desa Batu Sasak yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Balung
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan kapas
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Manggilang
4. Sebalah timur berbatasan dengan desa Tanjung Karang

Wilayah Desa Batu Sasak memiliki penduduk sebanyak 1.174 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 597 jiwa dan perempuan sebanyak

577 jiwa dan menyebar di 4 (empat) dusun. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Penduduk Menurut Usia.

No	Usia	Jumlah
1.	0 – 5 tahun	174
2.	6 -15 tahun	308
3.	16 – 25 tahun	275
4.	26 – 55 tahun	336
5.	56 tahun keatas	81
Jumlah		1.174

Sumber : Monografi Wilayah Batu Sasak, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak berada pada umur 26 – 55 tahun dan yang paling sedikit adalah yang berumur 56 tahun keatas. Hal ini berarti warga masyarakat Desa Batu Sasak didominasi oleh penduduk yang berusia dewasa dan berada pada usia produktif. Dengan dominannya usia produktif ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Batu Sasak. Tetapi meskipun usia penduduk produktif mendominasi penduduk Desa Batu Sasak, penduduk berusia muda juga sangat banyak, ini mengakibatkan angka ketergantungan pada Desa Batu Sasak sangat tinggi, karena banyaknya usia muda atau anak-anak. Sehingga warga masyarakat Desa Batu Sasak perlu bekerja keras untuk meningkatkan sector perekonomian mereka agar tercipta perekonomian yang maju dan bersaing.

Mata pencaharian penduduk desa Batu Sasak beraneka ragam dan kompleks, hal ini dikarenakan letaknya diantara jalur lintas barat. Sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk dapat memiliki mata pencarian yang beragam mulai dari nelayan, petani, pedagang, pegawai negeri ataupun swasta

Untuk lebih jelasnya jumlah tentang usia kerja yang ada di Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	10
2.	Swasta	15
3	Tani	513
4.	Dukun Kampung	4
5.	Pensiunan	1

Sumber : Monografi Wilayah Batu Sasak, 2011

Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian yang paling banyak berada di desa Batu Sasak adalah tani sedangkan mata pencarian yang paling sedikit adalah pensiunan. Hal ini berarti umumnya masyarakat Desa Batu Sasak memanfaatkan alam untuk sector pertanian dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Jumlah mata pencarian yang paling sedikit yaitu pensiunan, hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Batu Sasak sedikit memiliki warga yang usianya sudah lanjut atau usia yang tidak produktif lagi.

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas diperoleh juga informasi bahwa warga masyarakat Desa Batu Sasak didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Batu Sasak ke depannya. Dengan dominannya jumlah penduduk Desa Batu Sasak yang bertani, dapat diketahui bahwa ketergantungan warga masyarakat Desa Batu Sasak terhadap alam masih sangat tinggi.

4.5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan program pemerintah perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa di suatu Desa, sedangkan pada desa lainnya belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik.

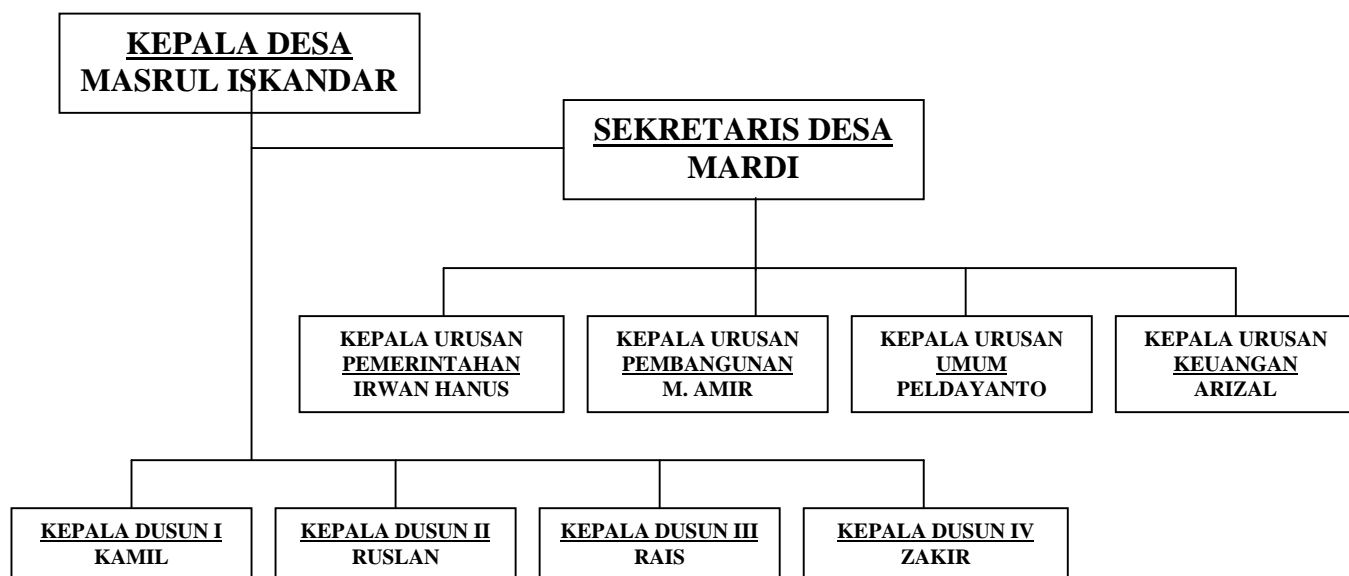
Untuk itu perlu ditinjau kembali struktur organisasi desa yang terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi dengan maksud yang sama yaitu membantu didalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan desa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD) serta dibantu oleh perangkat desa.

Adapun susunan dari pemerintah Desa adalah :

- a. Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - 1. Kepala Desa
 - 2. Badan Perwakilan Desa
- b. Pemerintah Desa dibantu oleh
 - 1. Sekretaris Desa
 - 2. Kepala Dusun
- c. Sekretaris Desa terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa sebagai Pimpinan
 - 2. Kepala-kepala Urusan

Lebih jelasnya struktur organisasi dan uraian tugas setiap unit kerja yang ada di desa Batu Sasak dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Desa Batu Sasak



Sumber : Desa Batu Sasak tahun 2011

Dari skema struktur organisasi pemerintahan desa di atas, kepala desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar. Adapun aparat pemerintah desa Batu Sasak kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar adalah :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Kepala Urusan : 4 orang
4. Kepala Dusun : 4 orang

Adapun uraian tugas-tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan dari struktur organisasi di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.

A. Kepala Desa

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan desa
2. Membina kehidupan masyarakat
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya di dalam atau di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD dalam menetapkan peraturan desa
8. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Begitu juga wewenang tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam bidang urusan rumah tangga desa antara lain :

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan
2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa.
3. Bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa
4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan milik dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan-peraturan daerah.
5. Bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku misalnya : jalan, jembatan,

gotong-royong, bangunan, lapangan, pekarangan, pasar, saluran air dan sebagainya,

6. Mengenai urusan-urusan penting sedapat mungkin kepala desa harus bermusyawarah dengan pamong desa lainnya.
7. Berwenang memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan desa
8. Memimpin rapat desa
9. Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa misalnya meminjam uang, melepaskan hak atas tanah desa pada Negara, mengadakan tindakan atau perjanjian yang menimbulkan ikatan.
10. Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa misalnya pasar, dan sebagainya.
11. Setelah kewenangan yang telah ada menurut hukum atau adat tetap menjadi kewenangannya.
12. Melaksanakan tugas pembantuan pada daerah kabupaten yang bersangkutan misalnya pajak kabupaten.
13. Menerima urusan tertentu dari daerah kabupaten untuk dijadikan urusan rumah tangga desa.
14. Wajib melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari instansi-instansi pemerintahan.
15. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa antara lain.
 - a. Menyusun dan melaksanakan anggaran desa
 - b. Menerima bantuan dari negara

- c. Menerima uang jasa dari jual beli tanah.
- d. Menerima iuran desa
- e. Menerima imbalan dari berbagai jasa pemerintahan desa.

Dibidang pemerintahan kepala desa adalah :

1. Administrator pemerintahan
2. Administrator masyarakat
3. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik personil desa dengan memindahkan wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan koordinasi antara dinas atau jawatan yang ada di desa.
5. Menyelenggarakan pengawasan atas keadaan dan segala kegiatan yang ada di desa.
6. Melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan penduduk
7. Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan kepada wilayah administratif dan mengenai urusan rumah tangga desa kepada daerah.
8. Melaksanakan atau membantu unit-unit PKK.
9. Menyukseskan pembangunan
10. Ikut menyukseskan lembaga sosial desa
11. Ikut perlombaan desa.
12. Menggalakkan pembangunan desa.
13. Membantu usaha jawatan atau instansi pemerintah yang sedang menyelenggarakan sesuatu di desa misalnya dibidang pertanian, perdagangan, perkebunan dan lain-lain.

Demikian juga tugas dan wewenang serta tanggung jawab lain yang belum atau tidak termasuk rumah tangga desa.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Kedudukan sekretaris Desa :

1. Urusan staf sebagai orang kedua
2. Memimpin sekretaris sekretariat desa.

Tugas sekretaris Desa :

1. Memberikan pendapat dan saran kepala desa
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan sekretariat desa
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa.
4. Merumuskan program kegiatan Desa.
5. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa.
9. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
11. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencabutan administrasi pertahanan

12. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.

Fungsi Sekretariat Desa adalah :

1. Kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
2. Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa
3. Administrasi kependudukan.
4. Administrasi umum.
5. Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan, sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

C. Kepala Urusan

Kedudukan Kepala Urusan dinyatakan :

- a. Kedudukan Kepala Urusan adalah unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
- b. Tugas Kepala Urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidangnya.
- c. Fungsi Kepala Urusan adalah :
 1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas.
 2. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa
- d. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada sekretaris desa

D. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati yang diusulkan oleh Kepala Desa.

1. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelakana tugas kepala desa di wilayahnya.
2. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
3. Fungsi Kepala Dusun adalah :
 - a. Melaksanakan Kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala desa
4. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Setelah melihat kemampuan Aparat yang ada di Desa Batu Sasak serta kemampuan masyarakat dalam memberikan jawaban pertanyaan berdasarkan kuisioner yang Penulis berikan, maka Penulis menguraikan secara singkat tentang, keadaan umur, tingkat pendidikan responden penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana background responden sampel yang dijadikan objek penelitian sehingga Penulis dapat lebih mengenalinya.

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	76	69,73 %
2.	Perempuan	33	30,27 %
Jumlah		109	100 %

Sumber : Data Penelitian, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 76 orang atau 69,73 % sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau 30,27 %.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dominannya jenis kelamin laki-laki yang diharapkan mampu lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

2. Kelompok Umur Responden

Bila dikelompokkan unsur kelompok umur dari responden penelitian, pada umumnya mereka yang berumur dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	Dibawah 25 tahun	-	-
2.	25 – 30 tahun	28	25,69 %
3.	31 – 40 tahun	38	34,86 %
4.	41 - 50	29	26,61 %
5.	51 tahun keatas	14	12,84 %
Jumlah		109	100 %

Sumber : Data Penelitian, 2011

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang berumur kurang dari 25 tahun tidak ada, untuk responden yang berumur antara 25 tahun sampai 30 tahun sebanyak 28 orang atau 25,69 %, untuk responden yang berumur antara 31 sampai 41 tahun sebanyak 38 orang atau 34, 86 %, kemudian yang berumur antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 29 orang atau 26,61 %, dan yang berumur diatas 51 tahun sebanyak 14 orang atau 12,84 %.

Dari uraian tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden berumur 31 sampai 40 tahun. Jadi responden yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tentang pelaksanaan pemilihan, pencalonan kepala desa umumnya adalah responden yang sudah berusia dewasa sehingga diharapkan nantinya mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan penuh tanggungjawab dan dapat memberikan jawaban yang sebenarnya serta dengan tepat.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Selain itu tingkat pendidikan formal responden baik responden pegawai maupun responden masyarakat sangat berpengaruh karena dengan semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh responden maka akan semakin mudah bagi responden untuk memahami pertanyaan yang diajukan. Untuk melihat tingkat pendidikan responden yang mempengaruhi cara kerja karena pola pemikirannya yang berbeda berdasarkan pendidikan yang didapatnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Perguruan Tinggi	5	4,59 %
2.	SMA	14	12,84 %
3.	SMP	50	45,87 %
4.	SD	40	36,70 %
Jumlah		109	100 %

Sumber : Data Penelitian, 2011

Dari tabel V.3 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan formal responden didominasi oleh responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 50 orang atau 45,87 % sedangkan responden yang sedikit merupakan responden yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 5 orang atau 4,59 %.

Jadi pendidikan yang didapat oleh responden penelitian didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Artinya masih didominasi pendidikan rendah. Meskipun pendidikannya rendah tetap diharapkan mampu untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan baik.

5.2. Analisis Implementasi Perda kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Upaya pencapaian tujuan organisasi tidak dapat dipisahkan dari pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi memiliki peranan yang sangat penting dimana sebagai seorang pimpinan hendaknya mampu menggerakkan para bawahannya agar mereka berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi.

Adapun peran pimpinan disini mencakup beberapa hal yaitu :

1. Peranan pemimpin dalam membuat keputusan
2. Peran pemimpin dalam menciptakan hubungan antar pribadi
3. Peran pemimpin yang berhubungan dengan informasi

Sebagaimana kita ketahui bahwa alasan utama seseorang memasuki berbagai jenis organisasi pada mulanya adalah karena terdorong oleh keinginan kuat untuk memuaskan berbagai kebutuhan yang tak mungkin dipenuhi tanpa menggunakan atau memasuki berbagai jalur organisasi lainnya.

Pada pemerintahan desa Batu Sasak sebagai suatu organisasi untuk dapat mengatur, mengkoordinasikan serta menggerakkan bawahan agar selalu termotivasi dalam bekerja. Seorang pimpinan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi instansi, kondisi kerja dan kondisi karyawan. Seorang pimpinan dengan perannya yang demokratis tentu lebih disenangi oleh karyawannya dibandingkan dengan pimpinan yang memimpin bawahannya dengan cara yang otoriter. Setiap bawahan membutuhkan arahan, bimbingan dan koordinasi yang tepat dari pimpinannya. Apabila arahan, bimbingan serta koordinasi tersebut diberikan oleh pimpinan yang benar-benar memahami situasi serta kondisi kerja

pegawainya, maka hal tersebut dapat membantu pegawai untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja.

Kepala desa sebagai pimpinan pada Desa Batu Sasak harus bisa memimpin dan membina pegawainya agar dapat membantunya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Tanpa kepemimpinan yang baik maka pimpinan tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena bawahan yang tidak mau diarahkan dalam melakukan tugas yang telah diberikan sesuai fungsi maupun jabatannya.

Seorang pimpinan yang baik harus dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga terciptanya semangat dan kegairahan kerja dari pegawai yang dipimpinnya. Dilihat dari beberapa indikator penelitian ini yaitu peran pimpinan dalam membuat keputusan, menetapkan sasaran, memilih dan mengemban tugas, mengadakan komunikasi, memberikan motivasi serta mengawasi pelaksanaan manajemen kerja suatu organisasi.

Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang dapat memimpin suatu pemerintahan desa dengan baik, maka masyarakat desa harus dapat memilih pemimpinnya dengan kesepakatan bersama dengan cara demokrasi dan tata cara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Bagaimana pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa di desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tanggapan-tanggapan responden di bawah ini :

1. Persiapan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, tahap pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan persiapan pencalonan kepala desa yang dikoordinir oleh Badan Pengawas Desa (BPD) beserta masyarakat desa bersangkutan. Dalam proses ini BPD dan masyarakat akan membentuk panitia pemilihan. Dimana panitia tersebut akan bertugas mulai dari persiapan pemilihan sampai kepada terpilihnya kepala desa tersebut.

Adapun daftar nama dan jumlah panitia pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar periode 2008-2014 dapat dilihat pada tabel yang terdapat pada halaman 5 (lima).

Dalam melaksanakan tugasnya, yang pertama kali dilakukan oleh panitia tersebut adalah tahap persiapan dimana pada tahap ini panitia terlebih dahulu akan melakukan pembukaan penjangkaran dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon kepala desa tersebut dengan memberikan informasi-informasi sehubungan dengan pencalonan kepala desa secara luas dalam bentuk pengumuman kepada masyarakat. Melalui kegiatan penjangkaran kepala desa tersebut maka setiap warga masyarakat dapat mengetahui dan berperan serta dalam proses pemilihan bahkan ikut mendaftar untuk maju menjadi calon kepala desa. Dengan demikian maka panitia akan memperoleh nama-nama calon kepala desa tersebut untuk kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai kandidat yang akan maju dalam proses pencalonan kepala desa.

Daftar nama calon kepala desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar periode 2008-2014 dapat dilihat pada halaman 6 (enam).

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian mengenai persiapan pencalonan dan pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4. Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Persiapan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Melakukan pencalonan	30	60	19	109
2.	Menetapkan nama calon	42	51	16	109
3.	Pengesahan nama calon	28	59	22	109
Jumlah		100	170	57	327
Rata-rata		33	57	19	109
Persentase		30,28	52,29	17,43	100,00

Sumber : Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai persiapan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan pihak aparaturnya Kantor Camat Desa Batu Sasak, Badan Pengawas Desa (BPD), panitia dan masyarakat untuk kategori baik dinyatakan oleh 33 orang responden atau 30,28 %. Adapun alasan responden memberikan tanggapan baik mengenai persiapan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Batu Sasak disebabkan karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak melaksanakan prosedur pencalonan untuk menetapkan nama-nama calon Kepala Desa.

Kemudian sebanyak 57 orang responden atau 52,29 % menyatakan kategori cukup baik, adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup baik mengenai persiapan pencalonan dan pemilihan kepala desa karena semua pihak

aparatus saling bekerja sama dalam melakukan persiapan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Adapun responden yang menyatakan kategori kurang baik sebanyak 19 orang Responden atau 17,43 %. Adapun alasan responden memberikan tanggapan kurang baiknya mengenai persiapan pencalonan dan pemilihan kepala desa karena pengesahan nama-nama calon kepala desa kurang dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat kurang mengetahui siapa nama calon tersebut.

Berikut ini hasil wawancara dengan ketua pemilihan kepala desa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni Sumantri pada tanggal 11 Mei 2011 :

Dalam melakukan pencalonan dan pemilihan kepala desa Batu Sasak, panitia sejauh ini melakukan beberapa persiapan baik melakukan siapa yang menjadi calon kepala desa, menetapkan nama calon dan mengesahkan nama calon tersebut setelah calon-calon tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, karena responden sebagian besar memberikan tanggapan bahwa dalam melakukan persiapan semua pihak baik aparat desa, panitia, Badan Pengawas Desa (BPD) dan masyarakat berupaya untuk menetapkan nama-nama calon kepala desa sesuai dengan ketentuan.

2. Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon

Tahap berikutnya setelah nama bakal calon yang akan maju tersebut sudah disahkan, maka proses selanjutnya panitia pelaksana pemilihan kepala desa Batu Sasak akan melakukan penjaringan dan penyeleksian terhadap nama-nama yang

telah terdaftar tersebut. Dalam hal ini proses penjaringan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 15 hari. Dalam kurun waktu tersebut panitia pemilihan akan melaksanakan tugas utamanya yaitu proses penyeleksian, dimana setiap bakal calon yang ada akan dilakukan penyeleksian yang mengacu kepada persyaratan dan kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dan dalam proses ini setiap bakal calon yang tidak memenuhi kriteria secara otomatis akan gugur, dan bakal calon yang dianggap layak dan memenuhi kriteria akan maju dalam proses pemungutan suara

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian mengenai penjaringan dan seleksi kepala desa di Desa Batu Sasak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5. Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Penjaringan dan Seleksi Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyeleksi syarat calon	43	47	19	109
2.	Penjaringan dilakukan selama 15 hari	34	51	24	109
3.	Seleksi dan penjaringan dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa	27	53	29	109
Jumlah		104	151	72	327
Rata-rata		35	50	24	109
Persentase		32,11	45,87	22,02	100,00

Sumber : Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai penjaringan dan seleksi kepala desa yang

dilakukan pihak aparaturnya kantor camat desa Batu Sasak, BPD, Panitia dan masyarakat untuk kategori baik dinyatakan oleh 35 orang responden atau 32,11 % adapun alasan responden memberikan tanggapan baik mengenai penjurangan dan seleksi kepala desa Batu sasak adalah karena semua pihak melakukan tahapan penjurangan sesuai dengan ketentuan.

Kemudian sebanyak 50 orang responden atau 45,87 % menyatakan kategori cukup baik adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup baik mengenai penjurangan dan seleksi kepala desa karena penyeleksian yang dilakukan bertujuan untuk memilih calon kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun responden yang menyatakan kategori kurang baik sebanyak 24 orang atau 22,02 % responden adapun alasan responden memberikan tanggapan kurang baiknya mengenai penjurangan dan seleksi kepala desa karena panitia kurang menyeleksi calon kepala desa khususnya dari segi pendidikan karena masih ada calon kepala desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang pencalonan dan pemilihan Kepala Desa bahwa calon Kepala Desa minimal harus berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota panitia pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni M. Yusuf pada tanggal 11 Mei 2011 :

Dalam melaksanakan pencalonan dan pemilihan kepala desa pihak panitia pemilihan terlebih dahulu melakukan seleksi dan penjurangan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, karena responden sebagian besar memberikan tanggapan bahwa dalam melakukan penjurangan dan seleksi kepala desa bertujuan agar calon kepala desa merupakan wakil masyarakat dan memiliki kualitas dan kuantitas yang diharapkan mampu menjalankan pemerintahan desa semaksimal mungkin.

3. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pada proses ini para calon kepala desa yang sudah lolos penjurangan dan penyeleksian yang dilaksanakan panitia pemilihan akan melaksanakan masa pengumpulan simpati masyarakat dengan cara kampanye dan sebagainya. Dimana setiap calon yang akan maju akan berjuang menarik simpati masyarakat sesuai dengan koridor dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan setelah batas waktu yang ditetapkan maka selanjutnya panitia akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara yang disaksikan oleh seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa di desa Batu Sasak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6. Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pemungutan suara oleh masyarakat	45	64	-	109
2.	Hasil suara yang diberikan dihitung	43	56	10	109
3.	Penghitungan suara disaksikan oleh semua pihak dan masyarakat	42	47	20	109
Jumlah		130	167	30	327
Rata-rata		43	56	10	109
Persentase		39,45	51,38	9,17	100,00

Sumber : Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan pihak aparaturnya Kantor Camat Desa Batu Sasak, BPD, Panitia dan masyarakat untuk kategori baik dinyatakan oleh 43 orang responden atau 39,50% adapun alasan responden memberikan tanggapan baik mengenai penghitungan dan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Batu Sasak karena suara yang masuk dihitung sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suaranya.

Kemudian sebanyak 56 orang responden atau 51,38% menyatakan kategori cukup baik adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup baik mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa

karena suara yang diberikan merupakan suara dari masyarakat dan masyarakat memberikan suara tersebut dengan calon pilihannya.

Adapun responden yang menyatakan kategori kurang baik sebanyak 10 orang atau 9,17% responden adapun alasan responden memberikan tanggapan kurang baiknya mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa karena panitia terkadang melakukan kecurangan dalam melakukan penghitungan suara sehingga calon yang terpilih bukan merupakan hasil suara terbanyak.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni Baharuddin pada tanggal 12 Mei 2011 :

Hasil perhitungan suara dari pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan penghitungannya disaksikan oleh masyarakat dan dilakukan secara terbuka atau transparan, hal ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui penghitungan secara langsung dan menghindari kecurangan dalam penghitungan suara. Dengan demikian masyarakat Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu akan merasa puas dan tidak berkecil hati dengan pemilihan kepala desa tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, karena responden sebagian besar memberikan tanggapan bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa bertujuan agar calon kepala desa merupakan calon yang dipilih masyarakat berdasarkan jumlah suara terbanyak dan tata cara pemilihan kepala desa tersebut berlangsung secara demokratis.

4. Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Setelah dilakukan perhitungan suara maka dapat diketahui siapa calon kepala desa yang terpilih, hal tersebut didasarkan atas jumlah suara yang paling banyak diberikan oleh masyarakat kepala calon kepala desa, calon kepala desa yang terpilih merupakan wakil masyarakat yang dinilai oleh masyarakat memiliki kualitas dan kuantitas sebagai kepala desa, pihak panitia pemilihan mengumumkan nama calon kepala desa terpilih tersebut dan mensahkannya.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian mengenai penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih di Desa Batu Sasak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7. Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Berdasarkan Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Mengumumkan syahnya pemilihan yang dilakukan	42	48	19	109
2.	Menetapkan calon kepala desa yang terpilih	33	59	17	109
3.	Pengesahan calon kepala desa terpilih	35	59	15	109
Jumlah		110	166	51	327
Rata-rata		37	55	17	109
Persentase		33,94	50,46	15,60	100,00

Sumber : Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan pihak aparaturnya Kantor Camat Desa

Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Badan Pengawas Desa (BPD), panitia dan masyarakat untuk kategori baik dinyatakan oleh 37 orang responden atau 33,94 % adapun alasan responden memberikan tanggapan baik mengenai penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa Batu Sasak karena calon kepala desa terpilih ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.

Kemudian sebanyak 55 orang responden atau 50,46 % menyatakan kategori cukup baik adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup baik mengenai penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa karena penetapan kepala desa terpilih merupakan hasil dari jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat.

Adapun responden yang menyatakan kategori kurang baik sebanyak 17 orang atau 15,60 % responden adapun alasan responden memberikan tanggapan kurang baik mengenai penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih karena dalam melakukan pengesahan calon kepala desa memakan waktu yang lama sehingga sehari-hari padahal calon kepala desa sudah diketahui dari hasil pemilihan.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu anggota panitia pemilihan kepala desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada tanggal 12 Mei 2011 :

Setelah hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa selesai, pihak panitia pemilihan mengumumkan hasilnya pemilihan dan menetapkan calon kepala desa yang telah terpilih.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, karena responden sebagian besar memberikan tanggapan bahwa dalam penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih

merupakan penetapan calon kepala desa yang sudah terpilih dan sah untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa dimasa yang akan datang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pencalonan dan pemilihan kepala desa di desa Batu Sasak kecamatan Kampar Kiri Hulu berikut akan penulis sajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel rekapitulasi hasil penelitian :

Tabel V.8. Rekapitulasi Analisis Implementasi Perda Kab. Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Persiapan pencalonan dan pemilihan kepala desa	33 (30,28)	57 (52,29)	19 (17,43)	109 (100,00)
2.	Penjaringan dan seleksi bakal calon	35 (32,11)	50 (45,87)	24 (22,02)	109 (100,00)
3.	Pemungutan dan penghitungan suara	43 (39,45)	56 (51,38)	10 (9,17)	109 (100,00)
4.	Penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih	37 (33,94)	55 (50,46)	17 (15,60)	109 (100,00)
Jumlah		148	218	70	327
Rata-rata		37	55	17	109
Persentase		33,94	50,46	15,60	100,00

Sumber : Penelitian Lapangan, 2011

Dari hasil tabel di atas tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik yang ditanggapi sebanyak sebanyak 55 orang atau 50,46 %. Ini berarti saat ini pencalonan dan pemilihan kepala desa di desa Batu Sasak sudah berjalan cukup baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka di sini responden memberikan tanggapan bahwa

pencalonan dan pemilihan kepala desa sudah cukup baik, dimana pencalonan dan pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan lancar dan demokratis, namun perlunya peningkatan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten sehubungan dengan pemilihan kepala desa khususnya dalam melakukan penyeleksian pendidikan calon kepala desa.

5.3. Kendala atau Hambatan Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa

Dalam pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau menjadi hambatan antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari panitia pemilihan

Panitia pemilihan kepala desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam setiap periode tidaklah selalu sama, hal ini dikarenakan untuk penyamarataan semua penduduk desa untuk berkesempatan menjadi panitia dan juga untuk mengkader masyarakat untuk bisa menjadi panitia pemilihan. Selain itu kepanitiaan ini dipergilirkan untuk menjadikan masyarakat desa menjadi lebih paham tentang pemilihan kepala desa.

Akan tetapi tidak adanya panitia yang berpengalaman pada pemilihan periode ini menjadikan pemilihan memiliki sedikit kendala atau hambatan, hal ini karena panitia yang bertugas merupakan “orang baru” yang kurang memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa masih mengalami beberapa hambatan, seperti pada proses pemilihan kepala desa banyak masyarakat yang kurang paham tentang tata cara pemilihan yang benar sehingga banyak kertas suara yang terbuang, hal ini

merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia. Jika panitia sering melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan Kepala Desa dengan benar kepada masyarakat maka hal ini tidak akan terjadi.

2. Kurang ketatnya pelaksanaan penyeleksian

Kurang ketatnya penjangkaran calon Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan mengakibatkan masih adanya calon kepala desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa. Sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, calon kepala desa minimal harus berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sehingga calon kepala desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak bisa lolos seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa panitia masih kurang berpengalaman.

Untuk melihat tingkat pendidikan calon kepala desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada halaman 6 pada Bab I.

3. Kurangnya akuntabilitas aparat

Pihak panitia, aparat desa dan Badan Pengawas Desa (BPD) diberikan wewenang penuh untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan dengan baik, setiap aparat mendapat pembagian kerja sesuai dengan uraian tugas jabatan, namun masih banyak aparat yang kurang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan wewenang yang telah diberikan.

Hal ini terlihat pada saat persiapan pemilihan Kepala Desa, berbagai administrasi perlu dipersiapkan, tetapi yang bekerja untuk hal itu semua hanya

sebagian. Misalnya menempel nama calon Kepala Desa yang akan dipilih, menempel daftar nama calon pemilih. Sehingga karena sedikitnya yang bekerja, akibatnya terjadi keterlambatan, yang seharusnya 3 hari menjelang pemilihan kepala Desa, nama-nama calon pemilih sudah bisa dilihat oleh masyarakat, Hal ini tidak terlaksana dalam arti kata tidak ada tertera pengumumannya, sehingga sebagian masyarakat enggan untuk memilih, mereka lebih suka untuk bekerja atau beraktifitas lain pada saat hari pemilihan, karena mereka beranggapan Pemilihan itu tidak penting karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih dan juga beranggapan bahwa pemilihan tidak berkompeten dan pemilihan bukan hal yang prioritas.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa maka Penulis dapat menarik kesimpulan dan saran berikut ini :

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa Batu Sasak dari tanggapan responden dan hasil wawancara dengan responden berada pada kategori cukup baik dalam arti kata Perda Nomor 4 Tahun 2007 implementasinya sudah cukup baik, alasan cukup baik ini diberikan karena saat ini pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang berjalan cukup lancar dan dilakukan secara demokratis
2. Dalam melaksanakan pencalonan dan pemilihan kepala desa masih terdapat beberapa kendala atau hambatan antara lain :
 - a. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari panitia pemilihan karena panitia pemilihan kepala desa dalam setiap periode tidaklah selalu sama.
 - b. Kurang ketatnya pelaksanaan penyeleksian, kurang ketatnya penjangkaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan karena sejauh ini masih terdapat kekurangan seperti masih adanya calon kepala desa yang berpendidikan Sekolah dasar (SD)

- c. Kurangnya akuntabilitas aparatur, pihak panitia, aparat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) diberikan wewenang penuh untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan dengan baik, setiap aparat mendapat pembagian kerja sesuai uraian tugas jabatan, namun masih banyak aparat yang kurang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan wewenang yang telah diberikan

6.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan di sini adalah

1. Panitia perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan pengalaman mengenai tata cara pemilihan kepala desa agar pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghadapi kendala yang ada
2. Melakukan evaluasi secara berkala melalui pertemuan rutin dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa agar semua pihak dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
3. Hendaknya semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan kepala desa lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, dan Sri Suyati. 1995. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya.
- Kansil, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Ndraha, Taliduhu. 2005. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara
- Nugroho, Rian. D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Alex Media Komputindo Gramedia
- Rasyid, Ryaas, 2001. *Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan*. Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri
- Saparin, 2000. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta, Galia Indonesia
- Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung, Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Mandar Maju
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Suryaningrat, Bayu. 1989. *Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara.
- Syahbudin, 2005. *Pelaksanaan Demokrasi di Desa*. Jakarta, Rineka Cipta
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Wasistiono. 2002. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokus Media
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Grafindo Persada.

Dokumentasi :

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, 1985 Tentang Seminar Desa dan Permasalahannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Desa

PP. Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

